

Nama : Diah Arum Sari Nawang Ulan

NPM : 2313031021

Kelas : 2023A

Matkul : Ekonomi Pendedikan

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

1. Efisiensi Anggaran Pendidikan

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Jawaban:

Pada kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten A telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar, yaitu 30% dari APBD. Namun, sebagian besar dana tersebut lebih banyak digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sementara program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan media pembelajaran digital masih kurang mendapat perhatian.

Jika dilihat dari efisiensi internal, penggunaan anggaran tersebut belum dapat dikatakan optimal. Efisiensi internal menekankan pada bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Memang pembangunan sekolah baru dapat

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, yang terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah. Akan tetapi, tujuan pendidikan tidak hanya menambah jumlah siswa yang bersekolah, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan prestasi belajar mereka. Karena hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan yang berarti, maka penggunaan anggaran tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan belum berjalan secara efektif.

Sementara itu, dari sisi efisiensi eksternal, kebijakan tersebut juga belum memberikan hasil yang maksimal. Efisiensi eksternal berkaitan dengan manfaat pendidikan bagi kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Ketika kualitas hasil belajar siswa tidak meningkat, maka kemampuan lulusan untuk bersaing, berinovasi, dan memenuhi kebutuhan pasar kerja juga cenderung tidak berkembang secara optimal. Artinya, dana yang telah dikeluarkan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban:

Kebijakan yang terlalu berfokus pada pembangunan sarana fisik sekolah memberikan dampak positif dalam hal pemerataan akses pendidikan. Semakin banyak sekolah yang tersedia, semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sistem pembelajaran, maka manfaat yang diperoleh menjadi kurang maksimal.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia berkembang secara lambat. Siswa memang memiliki tempat belajar yang lebih baik, tetapi mereka belum tentu memperoleh pembelajaran yang berkualitas. Akibatnya, kemampuan akademik, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta penguasaan teknologi yang dibutuhkan pada era

modern tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi daya saing tenaga kerja dan menghambat pembangunan ekonomi daerah.

Agar anggaran pendidikan dapat memberikan hasil yang lebih efektif, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih seimbang. Selain pembangunan infrastruktur, anggaran juga harus dialokasikan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperbarui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman serta memperluas penggunaan teknologi dan media pembelajaran digital di sekolah. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompetitif.

Kesimpulannya, penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut belum sepenuhnya efisien karena lebih berfokus pada pembangunan fisik dibandingkan peningkatan mutu pembelajaran. Meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, kualitas hasil belajar siswa belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional antara pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

2. Ketimpangan Akses Pendidikan

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

Jawaban:

Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Sekolah di perkotaan memiliki laboratorium yang lengkap, akses internet yang memadai, dan didukung oleh guru yang lebih profesional. Sementara itu, sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya jumlah guru, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya akses terhadap teknologi pembelajaran.

Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kesempatan belajar yang diterima siswa menjadi tidak sama. Siswa di perkotaan memperoleh lingkungan belajar yang lebih mendukung sehingga dapat mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan dengan lebih baik. Sebaliknya, siswa di pedesaan harus belajar dengan fasilitas yang terbatas, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa cenderung lebih rendah dibandingkan siswa di kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka.

2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Jawaban:

Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi dalam jangka panjang. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah yang memiliki akses pendidikan terbatas. Ketika siswa tidak memperoleh pendidikan yang berkualitas, mereka akan kesulitan mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Akibatnya, peluang untuk

mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi menjadi lebih kecil.

Selain itu, ketimpangan pendidikan juga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Individu yang memperoleh pendidikan berkualitas cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kemiskinan di daerah pedesaan sulit untuk dikurangi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dampak lainnya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong produktivitas dan pembangunan ekonomi. Jika sebagian wilayah tertinggal dalam bidang pendidikan, maka potensi ekonomi daerah tersebut juga akan berkembang lebih lambat dibandingkan daerah yang memiliki akses pendidikan lebih baik. Oleh karena itu, ketimpangan pendidikan bukan hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga dapat memengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Solusi Kebijakan untuk Mengurangi Ketimpangan Pendidikan

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih merata dan berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan, seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses internet yang memadai.

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan distribusi tenaga pendidik agar sekolah di daerah terpencil tidak mengalami kekurangan guru. Program

insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah pedesaan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di wilayah tersebut. Di samping itu, pemanfaatan teknologi pendidikan melalui pembelajaran digital perlu diperluas agar siswa di daerah pedesaan dapat memperoleh akses terhadap sumber belajar yang sama dengan siswa di perkotaan.

Pemerintah juga perlu memberikan bantuan pendidikan yang lebih terarah kepada sekolah-sekolah yang masih tertinggal serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pemerataan pendidikan. Dengan kebijakan yang tepat, kesenjangan pendidikan dapat dikurangi sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan.

Kesimpulan: Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan dalam bentuk perbedaan fasilitas, kualitas guru, dan akses teknologi antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kesenjangan pendapatan, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pemerataan fasilitas, distribusi guru, dan akses teknologi agar kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

3. Pengangguran Terdidik

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.

Jawaban:

Menurut teori *human capital*, pendidikan dipandang sebagai investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dalam kasus Kota B, jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat seharusnya menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas. Namun, kenyataannya masih banyak lulusan yang menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Jika ditinjau dari teori *human capital*, kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Perguruan tinggi mungkin telah berhasil meningkatkan jumlah lulusan, tetapi belum sepenuhnya mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan yang relevan terhadap perkembangan industri. Akibatnya, investasi pendidikan yang telah dilakukan belum menghasilkan peningkatan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diikuti oleh pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran di perguruan tinggi. Kondisi ini menyebabkan lulusan memiliki pengetahuan teoritis yang cukup baik, tetapi kurang menguasai keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibatnya, banyak lulusan mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Jawaban:

Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan tenaga kerja yang

kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Dalam kondisi ideal, lulusan perguruan tinggi seharusnya memiliki kemampuan yang dapat mendukung produktivitas perusahaan sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih besar.

Namun, pada kasus Kota B terlihat adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Perguruan tinggi menghasilkan banyak lulusan setiap tahun, tetapi kompetensi yang dimiliki sebagian lulusan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, dunia industri kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, sementara para lulusan juga mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan saja tidak cukup untuk mengurangi pengangguran. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Jika hubungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja tidak selaras, maka pengangguran terdidik akan terus meningkat meskipun tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Relevansi Lulusan

Untuk meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja, perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Penyusunan kurikulum juga perlu melibatkan dunia usaha dan dunia industri sehingga materi yang diajarkan lebih relevan dengan kondisi lapangan kerja.

Selain itu, program magang, praktik kerja lapangan, dan kerja sama antara perguruan tinggi dengan perusahaan perlu diperluas agar mahasiswa

memperoleh pengalaman kerja sebelum lulus. Penguatan keterampilan nonakademik (*soft skills*) seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan pemecahan masalah juga perlu menjadi perhatian karena keterampilan tersebut sangat dibutuhkan di dunia kerja.

Perguruan tinggi juga dapat meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, serta pembelajaran yang berorientasi pada proyek nyata. Dengan cara tersebut, lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja.

Kesimpulan: Pengangguran terdidik pada kasus Kota B terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan teori *human capital*, pendidikan seharusnya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, namun tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta mampu bersaing di pasar kerja.

4. Kenaikan Biaya Pendidikan

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Jawaban:

Kasus kenaikan uang kuliah sebesar 25% oleh universitas swasta dapat dianalisis melalui konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang

privat. Sebagai barang privat, pendidikan memberikan manfaat langsung kepada individu yang menempuhnya, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, peluang kerja, serta pendapatan yang lebih baik di masa depan. Dari sudut pandang ini, universitas memiliki alasan untuk meningkatkan biaya kuliah guna memperbaiki fasilitas kampus dan kualitas layanan akademik agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik.

Namun, pendidikan juga memiliki karakteristik sebagai barang publik karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan seharusnya tidak terhambat oleh kemampuan ekonomi seseorang.

Dalam kasus ini, kebijakan kenaikan biaya kuliah memang dapat membantu peningkatan kualitas layanan pendidikan, tetapi di sisi lain berpotensi membatasi akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik antara fungsi pendidikan sebagai investasi pribadi dan sebagai sarana pembangunan sosial yang harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Jawaban:

Kenaikan biaya pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah akan menghadapi beban keuangan yang lebih besar. Sebagian mahasiswa mungkin harus mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai kuliah, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang terpaksa menunda atau menghentikan studinya karena keterbatasan biaya.

Dari sisi sosial, kenaikan biaya pendidikan dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dan rendah. Mahasiswa dari keluarga mampu akan lebih mudah melanjutkan pendidikan, sedangkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan yang lebih besar. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan menjadi semakin tidak merata.

Dalam jangka panjang, tingginya biaya pendidikan juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Semakin sedikit masyarakat yang mampu mengakses pendidikan tinggi, semakin besar pula risiko berkurangnya tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu daerah maupun negara.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Menurut saya, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam situasi seperti ini. Hal tersebut karena pendidikan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Jika biaya pendidikan terus meningkat tanpa adanya dukungan atau pengawasan, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit memperoleh akses pendidikan tinggi.

Intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, subsidi pendidikan, atau program pinjaman pendidikan dengan bunga rendah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi kebijakan kenaikan biaya kuliah agar tetap berada dalam batas yang wajar dan disertai dengan peningkatan kualitas layanan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya intervensi tersebut, kualitas pendidikan tetap dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Langkah ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan

pemerataan pendidikan sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya.

Kesimpulan: Kenaikan biaya kuliah dapat dipahami dari sisi pendidikan sebagai barang privat karena bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Namun, pendidikan juga merupakan barang publik yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga aksesnya harus tetap terjaga. Kenaikan biaya pendidikan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi berupa meningkatnya beban biaya, ketimpangan akses pendidikan, dan berkurangnya kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk melanjutkan studi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi guna menjaga keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan.

5. Digitalisasi Pembelajaran

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.

Jawaban:

Kasus digitalisasi pembelajaran setelah pandemi menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk mengikuti proses belajar berbasis teknologi. Meskipun pembelajaran digital memberikan banyak kemudahan, pelaksanaannya juga menimbulkan berbagai biaya yang harus ditanggung oleh siswa dan keluarganya.

Berdasarkan konsep biaya pendidikan, proses belajar tidak hanya memerlukan biaya sekolah seperti uang pendaftaran atau pembayaran administrasi, tetapi juga membutuhkan biaya pendukung lainnya. Dalam

kasus ini, siswa harus memiliki perangkat elektronik seperti telepon pintar, laptop, atau tablet serta membeli kuota internet untuk mengakses materi pembelajaran. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, pengeluaran tersebut menjadi beban tambahan yang cukup besar sehingga menyulitkan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara optimal.

Sementara itu, jika dilihat dari konsep *opportunity cost* (biaya peluang), keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi harus memilih antara menggunakan pendapatan mereka untuk kebutuhan pendidikan atau kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, sebagian keluarga lebih memprioritaskan kebutuhan yang dianggap lebih mendesak dibandingkan pembelian perangkat atau kuota internet. Pilihan tersebut menyebabkan kesempatan siswa untuk mengikuti pembelajaran digital menjadi berkurang dan partisipasi belajar mereka menurun.

2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Jawaban:

Kesenjangan digital dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap kualitas pendidikan. Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet yang memadai dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih lancar, mengakses berbagai sumber belajar, serta berinteraksi dengan guru secara optimal. Sebaliknya, siswa yang mengalami keterbatasan teknologi akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan berisiko tertinggal dibandingkan teman-temannya.

Selain itu, kesenjangan digital juga dapat menyebabkan perbedaan hasil belajar antar siswa. Ketika akses terhadap teknologi tidak merata, kesempatan untuk memperoleh materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan digital menjadi berbeda. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kelompok siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu.

Dampak lainnya adalah menurunnya motivasi belajar siswa. Kesulitan mengakses pembelajaran secara terus-menerus dapat membuat siswa merasa tertinggal, kehilangan semangat belajar, bahkan berpotensi meningkatkan risiko putus sekolah. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, tujuan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran justru dapat menghasilkan ketimpangan pendidikan yang lebih besar.

Solusi Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Tersebut

Untuk mengurangi dampak kesenjangan digital, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi pendidikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan perangkat belajar seperti laptop atau tablet bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, pemerintah dapat menyediakan subsidi kuota internet atau memperluas akses internet gratis di sekolah dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan. Kerja sama dengan penyedia layanan internet juga dapat dilakukan untuk menyediakan paket pendidikan dengan harga yang lebih terjangkau bagi pelajar.

Sekolah juga perlu menerapkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dengan mengombinasikan metode daring dan luring. Dengan cara ini, siswa yang mengalami keterbatasan akses teknologi tetap dapat memperoleh materi pembelajaran melalui modul cetak atau kegiatan belajar tatap muka terbatas. Di samping itu, peningkatan literasi digital bagi guru, siswa, dan orang tua juga penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembelajaran.

Kesimpulan: Permasalahan pada kasus tersebut muncul karena tingginya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk perangkat dan akses internet, serta adanya biaya peluang yang membuat keluarga

berpenghasilan rendah harus mengorbankan kebutuhan pendidikan demi memenuhi kebutuhan pokok. Kesenjangan digital berdampak pada rendahnya partisipasi belajar, perbedaan hasil belajar, dan meningkatnya ketidakmerataan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berupa bantuan perangkat, subsidi internet, pemerataan akses teknologi, serta sistem pembelajaran yang lebih inklusif agar seluruh siswa dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama.